

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut KM. 5, Palangka Raya – 73112
Telp / Fax No. (0536) 3231165 – 3231111
E-mail : ptun.palangkaraya1@gmail.com

KATA PENGANTAR

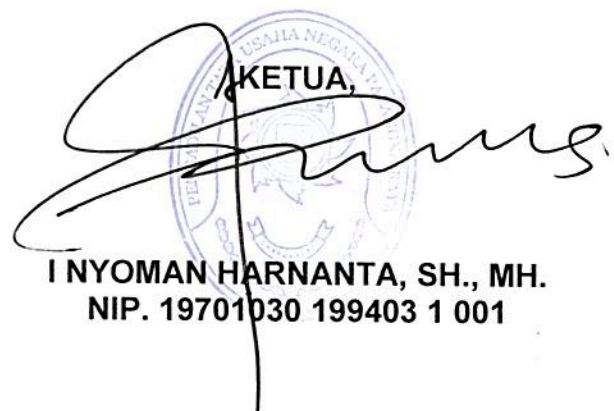
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini kita dapat menyusun Penetapan Kinerja.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Rencana Kinerja yang lebih sempurna.

Kepada seluruh Hakim, Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, khususnya yang secara langsung membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, dan kami berharap semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Palangka Raya, 02 Januari 2020


KETUA,
I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.
NIP. 19701030 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN	2
BAB III : PENUTUP.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print).

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini sebagai tonggak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 80% 10% 45% 23% 95% 75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	36 perkara	3.500.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	36 perkara	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu c. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 0%					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	0% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penyelesaian perkara prodeo Jumlah Jam Layanan konsultasi Hukum 	3 perkara 288 Jam Layanan	3.000.000 31.800.000
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang sedehana, transparan dan akuntabel.	36 perkara	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Persentase Tata Kelola dan Tata Administrasi di Kesekretariatan b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis c. Persentase Penyerapan Anggaran Pe-meliharaan dan Operasional Perkantoran	100% 100% 95%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan	Pemenuhan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Peradilan .	1 Layanan	4.001.797.000
6.	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan peradilan yang prima	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100%	25.000.000

Palangka Raya, 02 Januari 2020


 I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.
 NIP. 19701030 199403 1 001

BAB III

PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.